

PENGUATAN IDENTITAS PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Strengthening of Women Identity in the Choice of the Head of Region

Gustiana A. Kambo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
gustianakambo@yahoo.com

Abstract

The research explains about connection between gender equality and capability of women candidate in local election of Luwu Utara regency. The both things become basic of strengthen women identity that built by Indah Putri Indriani who will be running as a candidate of mayor in local election. Furthermore, women given equal chance and opportunity as men to involve in local election but still exist opinion that women are nor proper to be a leader because historically Luwu Utara regency never governed by a woman as well as do not have capability to manage heterogen society of Luwu Utara.

Key words: Identity, women, capability, gender equality.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.

Kata kunci: Identitas, perempuan, kemampuan, kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Babak baru pemilihan umum kepala daerah di Indonesia ditandai dengan perubahan, pemilihan umum tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan dipilih secara langsung oleh warga melalui sistem pemilihan secara langsung. Sistem pemilihan ini merupakan unsur yang terkait antara satu dengan yang lain, merujuk pada relasi wakil dan yang mewakilinya untuk mewujudkan keinginan rakyat dalam menentukan pilihannya.

Pemilihan umum kepada daerah merupakan momentum bersejarah serta menjadi ajang kontestasi politik bagi bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah secara terstruktur. Dalam catatan sejarah Indonesia, untuk pertama kali menggunakan sistem pemilihan dengan pilkada serentak dan hal ini merupakan ajang pembuktian bagi seluruh warga negara untuk mengambil peran dalam konstelasi tersebut, demikian juga bagi kaum perempuan.

Walaupun realitas partisipasi perempuan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia dianggap masih sangat rendah, dari 9 Provinsi, 36 Kota dan 224 Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015. Akan tetapi pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama juga menyisakan partisipasi calon perempuan dalam pemilihan tersebut, terdapat 116 perempuan yang berkompetisi dalam pemilihan umum kepala daerah, 54 mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 62 orang tercatat sebagai calon wakil kepala daerah. Dari 116 calon, hanya 14 orang perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah, salah satu yang terekrut adalah Indah Putri Indriani yang menduduki jabatan sebagai kepala kabupaten Luwu Utara propinsi Sulawesi Selatan

Kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk ikut aktif secara langsung dalam dunia politik akhirnya memunculkan calon-calon pemimpin perempuan dalam pemilihan umum, khususnya diarena pemilihan kepala daerah (pilkada). Kenyataannya, sampai saat ini di beberapa daerah telah diramaikan dengan pemilihan kepala daerah dengan munculnya fenomena partisipasi perempuan untuk menjadi kandidat kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati).

Partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah dan menempatkan dirinya dalam jajaran pimpinan daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pimpinan Daerah Perempuan

| Nama | Pimpinan di Daerah |
|----------------------|--------------------|
| Ratu Atut Chosiyah | Gubernur Banten |
| Neneng Hasanah Yasin | Bupati Bekasi |
| Atty Suharti Tochija | Walikota Cimahi |
| Anna Sophanah | Bupati Indramayu |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cellica Nurrachadiana | Wakil Bupati Karawang |
| Rustriningsih | Wakil Gubernur Jawa Tengah |
| Idza Priyanti | Bupati Brebes |
| Widya Kandi Susanti | Bupati Kendal |
| Rutriningsih | Bupati Kebumen |
| Sri Suryawidati | Bupati Bantul |
| Tri Risma Harini | Walikota Surabaya |
| Rina Iriani | Bupati Karanganyar |
| Ni Putu Eka Wiryastuti | Bupati Tabanan |
| Rita Widyasari | Walikota Kutai Kartanegara |
| Juliarti | Walikota Sambas |
| Suryatati A. Manan | Walikota Tanjung Pinang |
| Cristian Euginia Paruntu | Bupati Minahasa Selatan |
| Indah Putri Indriani | Bupati Luwu Utara |

Sumber : Data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan

Kebijakan *affirmative action* yang menempatkan kuota 30% bagi kaum perempuan merupakan awal dari pengarusutamaan keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia selain itu juga perempuan memberikan warna dalam proses politik yang sedang berjalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi di lembaga legislatif, merupakan kunci keterlibatan perempuan masuk dalam politik. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga membuka peluang bagi kaum perempuan ikut andil dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi dukungan tambahan juga didasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang memberikan kesempatan pada perempuan agar mencalonkan sebagai kepala daerah.

Kehadiran kandidat perempuan dalam sejumlah pemilihan kepada daerah di Indonesia, menunjukkan penegasan pemikiran yang disampaikan oleh Manuel Castells yang mengagungkan perspektif konstruktif dalam melihat transformasi politik di akhir era abad 20. Perspektif ini memandang bahwa runtuhnya tatanan patriarki berbarengan dengan tertatanya konstruksi pemikiran gender yang semakin menguat dengan fenomena yang mendukungnya. Dalam konteks ini, terjadi perubahan mendasar pada perempuan dalam formasi sosial, politik dan budaya baik dalam ranah privat maupun publik yang tidak lagi menempatkan kaum laki laki untuk mendominasi pembagian kerja dan peran.

Formasi politik pada pemilihan kepala daerah dalam penelitian ini, menggambarkan pola penempatan perempuan sebagai kandidat utama Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, di kabupaten Luwu Utara terjadi kompetisi politik antara Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini bapak bupati Arifin Junaidi dengan pasangannya, berkompetisi dengan wakil bupati Ibu Indah Putri Indriani dengan pasangannya dan pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh dua pasangan calon tersebut.

Pemilihan kepala daerah di Luwu Utara memberikan gambaran tentang kekuatan identitas sosok Indah Putri Indriani. Keikutsertaannya dalam pencalonan Bupati Luwu Utara periode 2016-2021 dibarengi dengan modal social dan modal politik yang mumpuni, sosok perempuan Indah dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan mengolah publik menjadi lebih dekat dengannya. Keramahannya sebagai seorang ibu dan bersifat ngayomi menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Indah. Pada sisi lain, Identitas Indah juga berkembang dari kecakapan dalam organisasinya, kemampuan mengolah Ilmu yang didapatkan di bangku Pasca Sarjana sebagai magister UI membawanya sebagai sosok calon bupati yang cerdas dalam ilmu politik, terlebih Indah pernah menjadi staf pengajar di beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Luwu Utara, penegasan tentang identitas perempuan sebagai calon yang layak menjadi salah satu issue yang dikembangkan. Keberadaan wilayah baru hasil pemekaran sejak tahun 1997, kabupaten Luwu belum pernah memperkenalkan perempuan untuk berpartisipasi secara politik menjadi calon. Sementara itu, pemilihan kepala daerah tahun 2015 untuk periode 2016-2021 mengikutsertakan sosok perempuan dan mengguli pesaingnya. Indah Putri Indriani-Thahar Rum (Pintar) sebagai pasangan yang menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan

memperoleh suara sebanyak 90.824 dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 220.073.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diarahkan dari rumusan masalah sebagai berikut: Upaya apa yang di lakukan oleh Indah Putri Indriani dalam memperkuat identitasnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Luwu Utara tahun 2015?

Pemikiran tentang Identitas

Studi identitas menjadi bagian dalam melakukan interaksi-interaksi sosial, baik dalam masyarakat heterogen maupun yang homogen. Dalam masyarakat yang heterogen jarang ditemukan adanya identitas tunggal. Akan tetapi, biasanya orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai dari pelbagai kelompok yang berbeda. Hal itu mengilhami beberapa pemikir yang mendalami kajian identitas

Studi identitas pada kenyataannya tidak didefinisikan sebagai suatu yang tunggal, homogen dan permanen. Identitas merupakan pemahaman yang melibatkan individu dan kelompok dalam suatu situasional atas keberadaannya. Dalam hal ini, Giddens mengkonstruksi sebagai *multiple identity* yang melibatkan pemahaman dasar atas tingginya etos “kepemenuhan/pemenuhan diri” (*self fulfillment*) serta “aktualisasi diri” (*self actualisation*). Apa yang disebutkannya bertitiktolak pada proses strukturasi modernitas yang menerobos ke ranah hidup pribadi. Bagi Giddens, diri (*self*) tidak hanya menjadi penentuan tradisi komunitas lokal, lebih dari itu, identitas diri menjadi proyek yang refleksif (1990: 114; 1991:5). Artinya, keseluruhan cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba pilihan yang disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan yang global. Dengan demikian proses ganda ‘menglobal dan melokal (mempersonal)’ dalam konstruksi identitas diri sebagai proyek refleksif merupakan elementer refleksif modernitas. Individu harus menemukan identitasnya dalam strategi-strategi dan pilihan-pilihan yang disediakan oleh sistem-sistem abstrak. Sedangkan aktualisasi diri yang dibangun dari kepercayaan dasar dalam konteks personalis hanya dapat dibangun oleh pengeluaran diri pada yang lain (Giddens, 1990: 176).

Sementara itu studi identitas pada dasarnya, melihat karakter individu yang tercermin sejak lahir sebagai suatu anugerah dari sang pencipta. Hal ini merupakan identitas dasar dan kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Terkait dengan pemikiran tersebut, Jary (Haralambos, 2000: 885) mengasumsikan bahwa identitas

adalah jati diri yang terkait dengan perasaan diri, yaitu rasa diri yang berkembang selama masa pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, yang dapat membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya.

Selanjutnya, Jary mengembangkan pemikirannya bahwa identitas tidak hanya dapat dilihat dari impresi kedirian kita sendiri tetapi juga berasal dari impresi diri dari orang lain, serta impresi orang lain tentang kita. Menurutnya, ada dua hal penting dalam menilai identitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal yang disebut pertama, sebagai faktor internal identitas terlahir dari apa yang terpikirkan tentang identitas kita, sedang dalam hal kedua, yakni identitas eksternal dapat diidentifikasi bagaimana orang lain melihat dan beraksi terhadap diri kita. Hal itu dapat menjadi sebuah pertentangan atau dapat mendukung dan memperkuat pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa, munculnya identitas berasal dari hubungan antara diri kita dengan orang lain. Dengan demikian identitas dibentuk dan ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri.

Konsep Kesetaraan Gender

Makna tentang kesetaraan gender berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesederajatan manusia. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Selain itu, pemaknaan ini juga mengacu pada jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

Terkait konsep di atas, dapat dipahami bahwa meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan, terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan.

Pemaknaan Gender merupakan sekumpulan arti sosial yang diletakan pada kategori-kategori sifat laki-laki dan sifat perempuan. Selain itu pemaknaan gender juga diasumsikan sebagai

suatu skala sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. Gender juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan laki-laki. Makna gender dalam khasanah ilmu-ilmu sosial diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis dan merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi dan terbentuknya masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik. Analisis gender sering ditolak oleh orang-orang yang melakukan kritik terhadap sistem sosial yang dominan seperti kapitalis. Penyebabnya dapat diidentifikasi karena: *pertama*; mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan system dan struktur yang telah mapan, bahkan menggoncang struktur dan system *status quo* ketidakadilan tertuang dalam masyarakat; *kedua*, banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah kaum perempuan harus dipertanyakan? Kesulitan lain dengan mendiskusikan soal gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi.

Berdasarkan perspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:

1. Akses, yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat, pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Orang harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas

kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang keduanya lakukan. Fakih (2012, 14) menyebutkan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur partai politik, semakin memberikan peluang yang besar kepada laki-laki untuk menciptakan tatanan politik yang bias gender, karena dominasi satu jenis seringkali melahirkan hegemoni dan kebijakan yang bias atas jenis lainnya.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau dalam mengakses pelayanan.

Berbeda halnya dengan keadilan gender yang merupakan keadilan pendistribusian manfaat dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan antara jenis kelamin. Masalah gender muncul bila ditemukan perbedaan hak, peran dan tanggung jawab karena adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak menguntungkan salah satu jenis kelamin (lazimnya perempuan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pengamatan terhadap masalah mendasar tentang perbedaan secara sosial antara perempuan dan laki laki dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara pada tahun 2015. Perbedaan secara sosial ini mengemuka dalam konteks pilkada dan memberikan keuntungan pada calon perempuan karena kemampuan yang berbeda dimilikinya dalam memenangkan kontestasi pilkada di Luwu Utara. Penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan demikian analisa akan dilakukan dengan memperhatikan berbagai fenomena baik berupa konteks, maupun teks dan opini masyarakat dan lembaga yang terkait dengan tujuan penelitian.

Melalui penggunaan metode kualitatif tersebut, dapat dicermati dinamika dari proses pemilihan kepala daerah di Luwu Utara tahun 2015. Penelitian ini menggunakan dua macam data

yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya memperkuat identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemanfaatan issue kesetaraan gender

Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara pada tahun 2015, issue gender menjadi bagian yang tidak dilepaskan dalam kontestasinya. Calon perempuan yang merupakan mantan wakil bupati sebelumnya yaitu Indah Putri Indriani maju mencalonkan diri sebagai Bupati. Indah sebagai sosok perempuan pertama yang ikut dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara dan memanfaatkan berbagai macam issue dalam programnya, tidak lepas juga tentang program yang terkait dalam kesetaraan gender.

Permasalahan yang telah lama berkembang dan mengemuka sebagai opini public yaitu tentang identitas perempuan yang dianggap tidak mampu untuk dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pemerintahan apalagi akan berperang sebagai kepala daerah (bupati), Pemanfaatan issue ketidakmampuan perempuan ini dibuktikan dengan sejarah yang memimpin Kabupaten Luwu utara sejak pemekaran dan perkembangannya daerahnya belum pernah di pimpin sosok perempuan.

Kontestasi pemilihan kepala daerah yang juga diikuti oleh incumbent bupati Luwu Utara sebelumnya (tahun 2010-2015) mengesankan adanya persetujuan dalam pemanfaatan issue identitas dan gender. Dalam banyak situasi berkembang opini public kembali tentang hal itu, di nyatakan bahwa untuk apa memilih calon perempuan sedangkan calon bupati laki-laki yang ada sudah memiliki bukti konkret kepada masyarakat terkait kinerjanya selama menjabat bupati Luwu Utara periode tersebut

Pemanfaatan issue identitas dan gender memberikan peluang tidak hanya bagi incumbent bupati namun juga bagi Indah. Situasi yang mengarah issue pemihakan pada identitas dapat dikendalikan oleh Indah dan menjadi peluang dirinya untuk semakin memanfaatkan issue tersebut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Luwu utara. Indah mampu meramu issue menjadi peluang dan faktor penentu di sekian banyak kampanyenya. Hal tersebut di tuturkan oleh Indah

“justru kedua isu itu, isu perempuan dan isu pendatang yang coba saya kelola dengan baik untuk kemudian membalik persepsi masyarakat bahwa masalahnya bukan pada perempuan dan pendatang tapi masalahnya adalah sejauh mana visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga kedua isu ini justru menjadi faktor pendorong.

Hasil wawancara tersebut ditekankan oleh Indah, bahwa yang menjadi permasalahan mendasar di Luwu Utara adalah bagaimana program yang ditawarkan sejalan dengan visi dan misi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, bukan tergantung pada siapa yang memimpin apalagi pada issue identitas baik sebagai perempuan ataupun sebagai pendatang. Kampanye yang dilakukan oleh Indah tetap mengapresiasi pada unsure kepemimpinan yang tidak harus membatasi antara laki dan perempuan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang ideal, mampu memimpin dengan baik, mendekati diri pada masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang kesemuanya dapat dilakukan secara formal dan informal.

Pertemuan formal dan informal yang banyak dilakukan oleh Indah sebagai calon bupati menjadi sarana praktis baginya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Interaksi yang sering dilakukan baik kepada warganya yang laki laki terlebih kepada warganya yang perempuan menjadi kebutuhan mendasar semasa kampanyenya. Dialog yang sifatnya intens tersebut, mendengarkan keinginan dan keluhan warga menjadi lebih mendekati posisi mereka. Dialog yang terjadi biasanya mengemuka pada persoalan kebutuhan akan pelayanan diberbagai sektor dan kebutuhan yang belum diakomodir oleh pemerintah.

2. Pemanfaatan Isue kapabilitas Calon Perempuan

Sebelum ikut dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara tahun 2015, Indah Puti Indriani yang merupakan wakil bupati periode 2010-2015, sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebelumnya. Dengan kecerdasan dan kepiawaiannya Indah Puti Indriani dapat merumuskan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan pada masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan layak untuk menjadi bahan pertimbangan untuk memilihnya di pilkada Luwu Utara 2015.

Perumusan visi dan misi yang ditawarkan di asumsikan sebagai bagian dari kapabilitas yang dimiliki oleh calon yang akan di pilih oleh masyarakat. Kaitannya dengan faktor kapabilitas sebagai wakil bupati periode 2010-2015, Indah Putri Indriani mengangapa dirinya telah melaksanakan pekerjaan (kinerja) dengan ikhlas. Hal itu dibarengi dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Masyarakat yang menilai dan paling mengerti dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan menentukan siapa calon pemimpin yang terbaik. Setiap calon yang mencalonkan sebagai Bupati mempunyai sisi terbaik, tetapi kemudian diserahkan pada masyarakat sebagai pemilih.

Hal yang sama serupa juga diperkuat oleh salah satu kader PDIP, yang menyebutkan :

“mempunyai status sebagai seorang perempuan belum tentu karir dan harapan akan terhenti. Tetapi masyarakat Luwu Utara tidak melihat dari segi jenis kelamin melainkan masyarakat Luwu Utara membutuhkan kualitas yang dimiliki oleh seorang calon Bupati baik itu laki-laki maupun perempuan.”

Penuturan diatas menggambarkan adanya rasionalitas dalam memilih yang tidak didasarkan atas jenis kelamin, namun memberikan keuntungan bagi calon perempuan dari para pemilih perempuan. Hal ini juga didukung fenomena pembentukan organisasi perempuan yang disebut dengan Kartini Pintar. Organisasi yang dibentuk secara spontan oleh ibu-ibu sebagai sukarelawan memiliki tugas yang penting saat pemilihan kepala daerah tahun 2015. Disaat itu bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi kepala daerah di Luwu Utara, organisasi Kartini Pintar ini intens melakukan sosialisasi kepada pemilih perempuan untuk mendukung Indah Putri Indriani sebagai Bupati karena memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki.

Organisasi Kartini Pintar merupakan wadah para ibu-ibu dari berbagai unsure yang bergabung dan membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam mengawal majunya Indah Putri Indriani dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan tuturan Indah Putri Indriani bahwa:

“Masyarakat secara sukarela membentuk tim Kartini Pintar, terbentuknya Kartini Pintar di mulai dari kemauan ibu-ibu yang bergerak dari rumah yang satu ke rumah yang lain dan dorongan mereka sehingga termotivasi dengan adanya kesetaraan gender.

Keterlibatan masyarakat khususnya para pemilih perempuan dalam mendukung Indah Putri Indriani didasarkan pada aspek afeksi (perasaan), merasa tersentuh tatkala perempuan tidak dipercaya dalam menjalankan tugas apalagi akan menjadi kepala daerah. sehingga ibu-ibu yang tergabung dalam Kartini Pintar terdorong untuk bergerak dari rumah kerumah untuk memperjuangkan kaum perempuan. Selain itu, sasaran kampanye yang mengarahkan pada persoalan perempuan juga dikembangkan seperti peningkatan pelayanan public dibidang kesehatan khususnya ibu dan anak, pelayanan dasar pendidikan terutama pendidikan pada usia dini anak, serta kreatifitas ekonomi rakyat dalam hal kewirausahaan pada kelompok perempuan.

Kapabilitas lain yang dimiliki Indah putri Indriani adalah sosok pemimpin perempuan yang ramah penuh simpati kepada masyarakat. Kedekatannya pada masyarakat didasarkan pada kerelaannya setiap saat menghadiri kegiatan dan undangan baik dalam bentuk apapun, sehingga banyak dikenal oleh masyarakat. Sosoknya yang simpati dan empati pada masyarakat ini merupakan kekuatan identitas sebagai perempuan yang biasanya dianggap lebih mengayommi.

Wujud dalam mengayomi juga digambarkan dalam kampanyenya, Indah Putri Indriani tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam membangun pola pikir masyarakat secara rasional dan kritis, tidak mudah terpengaruh oleh kampanye yang melakukan pemanfaatan money politic dan yang didegungkannya selalu pada makna bahwa memilih pemimpin karena melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki sang calon untuk memajukan daerah serta yang paling khusus kemampuan calon dalam mendekati diri kepada masyarakat.

Terkait pada upaya dalam penguatan identitas perempuan dalam pemanfaatan isu kesetaraan gender dan issue keabilitas`calon perempuan, analisis atas hal tersebut memperlihatkan peneguhan dalam pemikiran baik yang disampaikan oleh Jary (Halarambos,2000, 885) maupun oleh Fakih (2012, 14), yang dapat dikategorikan dalam empat hal yaitu;

Pertama; penguatan identitas merupakan akses, yaitu identitas yang terbangun dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara merupakan ruang yang sama bagi laki laki dan perempuan dalam memperkenalkan sumber daya yang dimilikinya. Walaupun issue mendistorsikan perempuan sebagai makhluk yang tidak layak untuk menjadi kepala daerah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa Indah Putri Indriani mampu membalikkan perspektif dengan menunjukkan kemampuan dirinya terutama saat melakukan kampanye . Penujukkan identitas dirinya sebagai individu yang layak dan mampu untuk memimpin dengan memanfaatkan kesempatan yang

memojokkan dirinya oleh Jary (Haralambos, 2000: 885) diasumsikan sebagai identitas yang berkembang seiring dengan tuntutan yang diinginkan oleh individu dalam lingkungannya.

Kemampuan Indah dalam memanfaatkan akses tersebut adalah bentuk kesadaran pada diri sendiri terhadap apa yang paling baik dan berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya. Agar dapat survive ditengah tekanan yang dihadapinya. Hal ini oleh Jary dianggap sebagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh individu yang ingin mempertahankan identitasnya, dalam penelitian ini jelas bahwa Indah mempertahankan Identitas dirinya sebagai perempuan dengan memanfaatkan akses yang ada untuk tetap bertahan.

Kedua; penguatan identitas dapat juga dilihat sebagai ruang partisipasi yang bebas dan otonom yang diberikan pada setiap individu. Partisipasi yang terbangun dalam diri setiap calon untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara menunjukkan adanya keterlibatan secara langsung baik dari laki laki maupun perempuan. Partisipasi ini ditekankan pada kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam dirinya.

Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Indah Putri Indriani merupakan hasil impresiasinya baik dalam dirinya sendiri sebagai perempuan maupun dengan impresiinya dengan orang lain dalam hal ini para pemilihnya (baca: masyarakat). Impresi eksternal diperlihatkannya dalam kampanye mengedepankan program yang sifatnya mengikutsertaan semua warga dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan anak usia dini perempuan serta pelayanan sosial lainnya.

Dalam kategori sosok Indah yang demikian oleh Jary (Haralamo, 2000, 885) dianggap sebagai individu yang mampu mengembangkan dirinya dari impresi kedirian dari dirinya sendiri (Inilah diri saya), dan kemampuan dalam mengembangkan dirinya dalam impresinya dengan orang lain sekaligus impresi orang terhadap dirinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat Indah yang ramah dan simpati kepada masyarakat adalah bagian dari dialogis dalam penciptaan dirinya sebagai pemimpin yang baik. Dengan demikian identitas perempuan yang terbentuk merupakan identitas yang ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri yang berkualitas.

Ketiga; penguatan identitas juga merupakan pengawasan (kontrol) yang tepat dalam implementasi kebijakan affirmative action. Kebijakan affirmative yang menempatkan kuota 30% bagi kaum perempuan menunjukkan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah untuk ;perempuan

dalam memberikan kesempatan dan kekuasaan pada proses pembangunan politik. Lebih dari itu, kebijakan ini juga membuka peluang bagi kaum perempuan ikut andil dalam pemilihan kepala daerah dimana didukung oleh UU No.32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang memberikan kesempatan pada perempuan agar mencalonkan sebagai kepala daerah.

Affirmative action dalam pemilihan kepala daerah di Luwu Utara memberikan kesempatan Indah Putri Indriani sebagai perwakilan perempuan ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan segala dinamikanya. Kesempatan yang dimiliki diformulasikan dengan menyuarakan disetiap kampanyenya, bahwa laki laki dan perempuan adalah sama dalam memimpin, yang terpenting apakah pemimpin itu amanah atau tidak, sehingga setiap orang punya hak yang sama dalam meraih jabatan politik.

Jika didasarkan pada kebijakan affirmative action, pemaknaan kesetaraan dalam kampanye harus diakui karena laki laki dan perempuan mempunyai hak yang setara khususnya di bidang politik, yang jelas bahwa baik laki laki dan perempuan juga memiliki hak setara pada segala hal yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak akan dibenarkan adanya pemiihakan karena hal itu dapat memudahkan timbulnya dominasi dan hegemoni (Fakih, 2012, 14)

Keempat; penguatan identitas harusnya memberikan kemamfaatan tidak hanya bagi individu yang mengkonstruksi identitasnya, tetapi juga dapat memberikan kemanfaatan bagi khalayak. Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Luwu utara , jelas memperlihatkan adanya kemanfaatan pemilihan kepada daerah itu bagi diri Indah sendiri karena Indah mampu memperkuat identitas perempuannya menjadi *power ful identity* dalam konstestasinya.

Sedangkan penguatan identitas perempuan bagi masyarakat, tergambar dari pembentukan organisasi perempuan dalam Kartini Pintar. Kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi, solid dan terlembaga dalam memperjuangkan hak hak perempuan. Selain itu, penelitian ini jelas memperlihatkan kemanfaatan dari program kerja yang disampiakan oleh calon saat kampanye yang digagas dalam bentuk visi dan misi. Lebih dari itu, sosialisasi dari visi dann misi dilakukan dengan cara *door to door* dan hal ini memberikan kemamfatan dalam kedekatan antara calon pemimpin dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian dalam pemilihan kepala daerah di Lueu Utara pada tanggal (9 Desember 2015, mensyaratkan issue kesetaraan gender dan issue kapabilitas calon perempuan. Kedua issue saling bersingungan dan berkembang yang menganggap perempuan tidak layak apalagi mmiliki kemampuan untuk memimpin kabupaten Luwu Utara. Hal ini didasarkan pada aspek historis dan aspek kapabilitas yang menganggap bahwa kabupaten Luwu Utara hanya layak di pimpin oleh laki laki. Kedua issue yang kemudian diformulasi oleh indah Putri Indriani sebagai *power full identity* membawa posisi yang kuat bagi dirinya dan mengembangkan issue tersebut sebagai ruang pendekatan yang intens kepada masyarakat dan membawa kemenangannya dalam Pemilihan Kepala daerah di Luwu Utara.

REFERENSI

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agustino, Leo. 2007. *Politik Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik*, Yogyakarta: PT.Graha Ilmu
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancur Alam
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Dasar Dasar Ilmu Politik* .Jakarta: Gramedia Pustaka
- Daulay, Harmona. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan : USU Press
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Heywood, Andrew . 2014. *Politik Edisi ke-4*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jary dalam Haralambos and Holborn., 2008, *Sociology Themes and Perspectives* Collins Educations.
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Manuel, Casstel. 1997. *The Power of Identity*, London and New york
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana

- Moenandar, 1985. *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI pres
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono Santoso, Widjajanti. *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan*
- Rusli Karim, M. 1991. *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*. Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*
- Tilaar, Martha. 2013. *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat

Referensi Jurnal Ilmiah

- Alfirdaus, Laila Kholid, 2008. "Kebijakan setengah hati kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen". Jurnal Konstitusi: membangun konstitusionalitas Indonesia, membangun budaya sadar berkonstitusi. Vol. 5 Nomor 2, November, ISSN 1829-7706. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Buku Seri Demokrasi Edisi V. 2007. "*Membangun Aksi Demokrasi: Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang*". Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's (Public Policy Ananalysis and Community Development Studies) Averreos dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) kerjasama dengan Averroes Press.
- Fajar Apriani. *Keterwakilan Perempuan Dalam Kancah Politik (studi Kasus Pendapat Perempuan Kota Samarinda*.
- Febrianto Syam, *Dukungan Terhadap Calon Walikota Perempuan, Jakarta 2013*
- Hendri Koeswara. *Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol Pada Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005*
- Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 4, Desember 2012, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.